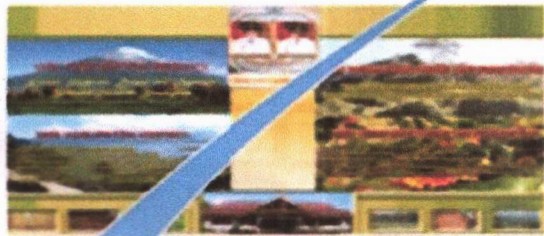




RENCANA KERJA (RENJA 2023)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH**



Jln. Gajah Mada Komplek Kantor Walikota Sungai Penuh No. 01

Telpon ☎ 0748 - 323454 Fax ✉ : 0748-323454



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Gajah Mada Nomor 01 Komplek Kantor Walikota Sungai Penuh

Telp. (0748) 323454

Faximile. (0748) 323454

SUNGAI PENUH 37112

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

Email : Setko@sungaipenuhkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR : 800/ Kep. /BKPSDM/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) dan menetapkan Rencana Kerja dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
 - 5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026;
14. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.217/2021 tentang Standar Biaya Umum Satuan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.218/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023.**
- KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2023;**
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan;**
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.**
- KEEMPAT : Sistematisa Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat**
- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022**
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**
- BAB V : PENUTUP**

LAMPIRAN :

I. Tabel Renja 2023 Permendagri 90 Tahun 2019 sesuai RKPD 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal Juli 2022

Pit. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH,



NINA PASTIAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19760831 200604 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Sungai Penuh di Sungai Penuh (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
3. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
4. Kepala Bappeda Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
5. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Karunia dan Ridha-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Tahun 2023 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023.

Perwujudan konsep pembangunan sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur yang efektif dan efisien menemui banyak tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis, perubahan kondisi sosial politik dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan proses penyusunan konsep pembangunan yang perlu terus ditingkatkan.

Perencanaan merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien. Perencanaan yang baik dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dengan tujuan/hasil yang ingin dicapai. Rencana Kerja (Renja – SKPD) merupakan salah satu proses dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah diamanatkan Undang – Undang. Renja - SKPD ini memuat program/kegiatan prioritas, arah dan kebijakan pembangunan, tujuan dan sasaran yang dicapai hingga kebijakan pendanaan serta permasalahan yang akan dihadapi.

Semoga dengan telah tersusunnya Renja SKPD ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien khususnya sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Aparatur. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023.

Sungai Penuh,

2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH



NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si

Perbina
NIP. 19760831 200604 2 011

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2021	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	39
3.3. Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	49
BAB V PENUTUP	58

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan. Adapun program, kegiatan, sub kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renja tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Sektor Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah banyak berperan dalam pencapaian sasaran pembangunan serta pertumbuhan perekonomian Kota Sungai Penuh pada tahun-tahun sebelumnya, namun demikian peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di lingkungan internal maupun eksternal, BKPSDM selalu melakukan perubahan-perubahan (menambah, mengurangi, dan/atau memodifikasi) terhadap alur tata laksana yang berjalan saat ini. Alur tata laksana yang efektif dan efisien merupakan tantangan besar karena perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan setiap elemen yang ada di BKPSDM Kota Sungai Penuh.

Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan dibidang birokrasi kepegawaian antara lain menetapkan kebijakan Pemantapan Kelembagaan dan ketatausahaan, pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian, pengembangan sistem dan manajemen diklat, pengembangan sarana dan prasarana, pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi, Pendayagunaan pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengeluarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, bahwa kedudukan BKPSDM adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian.

Dalam pelaksanaan Tupoksi tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh mempunyai kewenangan tentang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, penyusunan program dan tugas lainnya yang diserahkan Kepala daerah di Bidang Kepegawaian yang dituangkan dalam **RENCANA KERJA TAHUNAN** untuk 1 (Satu) tahun kegiatan.

Agenda pembangunan Kepegawaian diarahkan pada perwujudan Pelaksanaan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh yaitu 2021-2026: **"TERWUJUDNYA KOTA SUNGAI PENUH MENJADI KOTA PENDIDIKAN, BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG MANDIRI, MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DENGAN SLOGAN "MAJU DAN BERKEADILAN".** Dengan perincian sebagai berikut:

Pendidikan : Diartikan bahwa Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi pusat pendidikan yang berkualitas, maju dan mandiri berwawasan lingkungan dan bertaraf Internasional sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, inovatif, tangguh menghadapi tantangan dan berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan yang mandiri : Diartikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat meliputi berbagai bidang usaha kecil dan menengah, jasa, perdagangan, koperasi, home industri dan sektor ekonomi lainnya serta menggali sumber daya yang ada, sehingga terwujud masyarakat yang dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Religius : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh di harapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama secara nyata, baik dan benar sehingga tercermin dalam pola pikir, bertingkah laku dan kehidupan bermasyarakat sebagai pencitraan diri sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.

Budaya : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh adalah masyarakat yang beradat, memiliki corak budaya yang beraneka ragam dan berbagai suku akan dibina menjadi khasanah kekayaan. budaya Kota Sungai Penuh sehingga menjadi aset wisata di Propinsi Jambi.

Sejahtera : Diartikan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh Memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesejahteraan yang baik, sehingga dapat hidup layak, aman dan tentram.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Sungai Penuh berperan dalam meningkatkan **"SEJAHTERA"** Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pelayanan administrasi kepegawaian dan penegakan peraturan aparatur sehingga aparatur dapat bekerja secara optimal dalam melayani masyarakat.

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter tinggi, berbasis nilai agama dan budaya;
2. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kota Sungai Penuh yang baik, mandiri dan bebas KKN;
3. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah;
4. Pemerataan dalam peningkatan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar Permukiman;
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
6. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup;
7. Mewujudkan kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat Kota Sungai Penuh.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, BKPSDM Kota Sungai Penuh melaksanakan **misi kedua Walikota** Sungai Penuh yaitu meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN.

Langkah-langkah pelaksanaan misi dimaksud dijabarkan dalam :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan (Diklat);
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepegawaian daerah;

4. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian daerah yang meliputi pengembangan sumber daya aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian dan penyelenggaraan diklat pegawai;
5. Penyusunan program dan rencana kerja bidang kepegawaian daerah yang meliputi manajemen kepegawaian, sistem informasi kepegawaian serta penyelenggaraan dan pengembangan diklat;
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pengembangan karier pegawai;
8. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan memasuki masa pensiun serta pemberian hukuman bagi pegawai yang indisipliner;
9. Penyiapan, pengkoordinasian, penyelenggaraan serta pengembangan diklat pegawai (Struktural, fungsional dan teknis substantif)
10. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang kepegawaian daerah yang diberikan oleh Walikota.

Visi yang ingin dicapai tersebut diatas tentu saja berpedoman pada tujuan, sasaran yang akan dicapai serta program dan kegiatan yang disusun untuk 1 (satu) tahun kedepan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan berisikan program dan kegiatan yang merupakan wujud dari pencapaian target pembangunan sektor kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 berlandaskan pada :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9898, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871).
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021-2026.
25. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.217/2021 tentang Standar Biaya Umum Satuan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.218/2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota untuk satu tahun mendatang. Secara Khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

- a. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan, Renstra dan Hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
- b. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dan manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
- c. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.
- d. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota serta indikator kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.
- e. Menjadi acuan program dan kegiatan bagi Bidang dan Seksi lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2021

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan Renstra SKPD 2021-2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum dari sasaran stratejik yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator sasaran yang mencapai target yang diharapkan. Di sisi lain, keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tak lepas dari keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing bagian organisasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 mempunyai 3 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 50); Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 37 (Tiga Puluh Tujuh) sub kegiatan yang telah ditetapkan, secara umum telah mencapai target kinerja yang diharapkan namun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang diinginkan dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan regulasi (peraturan).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh Tahun 2021 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada seluruh kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dengan diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja, maka indikator kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja menggunakan sumber data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja. Realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 84,90 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Dari capaian tersebut terdapat dua indikator penting sebagai tolok ukur dari keberhasilan tersebut, yaitu:

1. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelayan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh di Tahun 2021 melaksanakan 3 Program 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Berdasarkan hasil realisasi capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 84,90 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran program/kegiatan, walaupun rata-rata namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala serta hambatan sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Sungai Penuh terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan termasuk belanja penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Anggaran Program ini sebesar Rp. 5.739.847.408,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 4.328.651.200 (*Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau realisasi keuangan sebesar 75,41 % hal ini disebabkan terlalu besarnya standar komponen biaya perjalanan dinas yang terdapat dalam sub kegiatan. Adapun upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan dilakukan usulan untuk penyempurnaan standar komponen perjalanan dinas untuk tahun anggaran berikutnya. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran, kegiatan tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

II. Program Kepegawaian Daerah

Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara prosedural, transparan, akuntabel, objektif, cepat dan tepat waktu. Program Kepegawaian Daerah merupakan inti pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh yang bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di Kota Sungai Penuh. Program ini bertujuan membangun sistem pembinaan PNS yang komprehensif dan membangun sistem pola karir PNS yang terstruktur. Untuk mencapai sasaran program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur didukung oleh 4 (empat) kegiatan dengan 12 (dua belas) sub kegiatan. Dana yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan program Kepegawaian Daerah adalah sebesar Rp. 1.539.031.850,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah*) dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.067.920.502,- (*Satu Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*) dengan persentase realisasi keuangan sebesar 69,39 %. Hal ini disebabkan

adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti kegiatan seleksi CPNS dan PPPK. Seleksi penerimaan CPNS tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 sehingga ada beberapa rekening anggaran tidak bisa terealisasi. Begitupun dengan seleksi penerimaan PPPK tidak bisa dilaksanakan, karena penganggaran penggajian dan pemberian tunjangan PPPK dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Sungai Penuh dimana Pemerintah Kota Sungai Penuh tidak punya anggaran untuk itu.

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dibebankan indikator dan target pada program Kepegawaian Daerah berdasarkan Dokumen Anggaran Kota Sungai Penuh yaitu indikator Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian target A, menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS 3/1000 ASN, Persentase Aparatur pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya 80 %, Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu 100 %, Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan 97 %, persentase tingkat Pendidikan aparatur yang berpendidikan S1, S2, S3 67, 85 ASN dan persentase updating data kepegawaian 95 %.

III. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur yang profesional dan terampil dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh dibebankan target pada program Pengembangan Sumber Daya Aparatur berdasarkan RPJMD Kota Sungai Penuh yaitu Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100 %, Persentase PNS yang telah mengikuti diklat fungsional 82 % dan Persentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis setiap tahunnya 75 %.

Untuk program ini terdapat 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.535.268.300,- (*Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*) realisasi anggaran sebesar Rp. 1.476.232.564,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) atau realisasi keuangan 96,15 %, realisasi kinerja sebesar 100%.

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
 Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
 Kota Sungai Penuh

Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 03 01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 3) Cakupan Peningkatan disiplin aparatur; 4) Persentase terbangunnya Badan Pendidikan dan Pelatihan/ Gedung CAT; 5) Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur;	100	80,00	20	20,00	100	100	100	100
4 5 03 01 2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100,00	15,76	22,63	22,63	100	100	46,13	46,13
4 5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1) Jumlah Dokumen Realisasi fisik dan keuangan SKPD, 2)Jumlah dokumen SPI Keuangan yang dikelola, 3) Jumlah Laporan E-Monev SKPD, 4) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP) KPK, 5) Jumlah Dokumen Pengelolaan Website SKPD, 6) Jumlah Dokumen PMPRB SKPD	42	6	7	6	86	7	19	45,24
4 5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1) Jumlah Dokumen Arus Kas SKPD, 2) Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD, 3) Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD, 4) Jumlah Dokumen RKA Murni SKPD , 5) Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD, 6) Jumlah Dokumen RKBM SKPD	36	6	6	6	100	6	18	50,00
4 5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen LKJP SKPD, 2) Jumlah dokumen LKP SKPD, 3) Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja SKPD, 4) Jumlah Dokumen LPD SKPD, 5) Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD, 6) Jumlah Dokumen Data Base Indikator Kepegawaian, 7) Jumlah Dokumen Pakta Integritas SKPD, 8) Jumlah Dokumen SPI SKPD, 9) Jumlah Dokumen PPID SKPD, 10) Persentase pelaksanaan SAKIP SKPD	42	7	7	7	100	7	21	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen LKJIP SKPD, 2) Jumlah dokumen LKPI SKPD, 3) Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja SKPD, 4) Jumlah Dokumen LPPD SKPD, 5) Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD, 6) Jumlah Dokumen Data Base Indikator Kepegawaian, 7) Jumlah Dokumen Pakta Integritas SKPD, 8) Jumlah Dokumen SPIP SKPD, 9) Jumlah Dokumen PPID SKPD, 10) Persentase pelaksanaan SAKIP SKPD	42	7	7	7	100	7	21	50,00
4 5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Renja Murni SKPD, 2) Jumlah Dokumen Renja Perubahan SKPD, 3) Jumlah dokumen Renstra SKPD, 4) Jumlah Dokumen KAK SKPD, 5) Jumlah Dokumen SOP SKPD, 6) Jumlah Dokumen RKT SKPD, 7) Jumlah Dokumen Rencana Aksi SKPD	45	7	7	7	100	7	21	46,67
4 5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100	80	20	20,00	100	100	84,00	84,00
4 5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian gaji dan tunjangan ASN yang telah diselesaikan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	350	34	50	34	68	50	118	33,71
4 5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84	12	12	12	100	12	36	42,86
4 5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Panitia Jasa Administrasi Keuangan yang memperoleh Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Proses UP, GU, TU, LS	84	12	12	12	100	12	36	42,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1) Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun, 2) Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD, 3) Jumlah Laporan LKPD SKPD 4) Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD akhir tahun, 5) Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD Semesteran, 6) Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	7	1	1	1	100	1	3	42,86
	Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5	0	0	0	0	1	1	20,00
4 5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN serta Blmtek/ Sosialisasi dan Diklat	100	80	20	20,00	100	100	100,00	100,00
4 5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Harian ASN, 2) Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga dan perlengkapannya, 3) Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri, 4) Jumlah Administrasi Kepegawaian Dan Peningkatan Disiplin PNS Non PNS yang dikelola, 5) Jumlah Daftar Urut Kepegawaian (DUK), 6) Jumlah Evaluasi Kinerja Berjenjang Lingkup SKPD, 7) Jumlah Fasilitas Event daerah dan hari besar nasional, 8) Jumlah Fasilitas Pelayanan Satu Pintu, 9) Jumlah Laporan GDN, 10) Jumlah LHKPN dan LHKSN SKPD, 11) Jumlah Penataan Kearsipan SKPD, 12) Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	21	3	3	3	100	3	6	28,57
4 5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	140	15	20	15	75	20	50	35,71
4 5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	80	20	20,00	100	100	84,00	84,00
4 5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang terpenuhi	301	43	43	43	100	43	129	42,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1) Jumlah barang cetakan yang terpenuhi, 2) jumlah penggandaan Penggandaan yang terpenuhi	35	5	5	5	100	5	15	42,86
4 5 03 01 2.06 01	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan yang terpenuhi	119	17	17	17	100	17	51	42,86
4 5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang terpenuhi	21	3	3	3	100	3	9	42,86
4 5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum yang terpenuhi	21	3	3	3	100	3	9	42,86
4 5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140	20	20	20	100	20	60	42,86
4 5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	80	20	20,00	100	100	84,00	84,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional	6	0	0	0	0	0	0	0,00%
4 5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan Aset tetap kantor	28	4	4	4	100	4	12	42,86
4 5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	80	20	20,00	100	100	84,00	84,00
4 5 03 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar	84	12	12	12	100	12	36	42,86
4 5 03 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1) Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 2) Jumlah Jasa Komunikasi (Rekening Internet SKP Online)	28	4	4	4	100	4	12	42,86
4 5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya penyediaan jasa kebersihan Kantor	14	2	2	2	100	2	6	42,86
4 5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100	80	20	20,00	100	100	84,00	84,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanannya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6	4	4	4	100	5	13	216,67
4 5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perbaikan peralatan kerja	21	2	2	2	100	3	7	33,33
4 5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6	3	3	3	100	1	7	116,67
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1) Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu; 2) Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan; 3) Persentase Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya; 4) Persentase tingkat Pendidikan aparatur yang berpendidikan S1, S2, S3; 5) Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS; 6) Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan kepegawaian; 7) Persentase updating data kepegawaian;	1) 100%; 2) 93%; 3) 82%; 4) 83%; 5) 15%; 6) 100%;	1) 100%; 2) 97%; 3) 85%; 4) 87%; 5) 75%; 6) 100%;	20	20,00	100	20	60,00	#VALUE!
4 5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	100	20	20,00	100	100	104,00	104,00
4 5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Formasi ASN melalui e Formasi dan tersusunnya rekapitulasi Kebutuhan ASN	80	2	1	0	0	0	2	2,50
		Terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK								
4 5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Inventarisasi PNSD Yang Akan Pensiun Secara Otomatis, PNSD yang pensiun atas permintaan sendiri dan PNSD pensiun janda/Duda dan PNSD yang BUP Golongan IV c Keatas	14	2	2	2	100	2	6	42,86
4 5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Fasilitasi penerbitan kartu Taspen PNS								
		Terlaksananya peremajaan data kepegawaian								

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 02 2.01 11		Terkendalinya Website SKPD	7	1	1	1	1	1	3	42,86
		Terlaksananya koordinasi updating data persemester								
		Terlaksananya penyusunan laporan triwulan data kepegawaian								
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Kepegawaian Dalam Bentuk Elektronik/Digital								
4 5 03 02 2.02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Fasilitasi KPE PNS Kota Sungai Penuh	7	1	1	1	100	1	3	42,86
		Terlaksananya scanning arsip kepegawaian								
		Terfasilitasinya penerbitan Karpeg								
		Pengkodean arsip kepegawaian								
4 5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100	100	100	20,00	20	20	104,00	104,00
4 5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	1) Jumlah mutasi PNS, 2) Jumlah Pelaksanaan Seleksi Mutasi Masuk PNS, 3) Jumlah Penerbitan SK Rekomendasi Melepas, 4) Jumlah Penerbitan SK Rekomendasi Menerima, 5) Jumlah Penetapan Formasi Mutasi PNS, 6) Jumlah SK Mutasi Dalam Daerah, 7) Jumlah SK Penempatan	21	3	3	3	100	3	9	42,86
4 5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Inventarisasi data kenaikan pangkat PNS dan Fasilitasi Perubahan Status Pendidikan	14	2	2	2	100	2	6	42,86
		Verifikasi berkas kenaikan pangkat PNS dan Perubahan Status Pendidikan								
		Asistensi dokumen kenaikan pangkat dari BKN								
		Terbitnya persetujuan teknis kenaikan pangkat dan perubahan status pendidikan								
		Terbanggunya data base kenaikan gaji berkala otomatis PNS								
4 5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya nominasi PNS yang memenuhi syarat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas								

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Terlaksananya Proses pengangkatan, Pemindahan, pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas								
		Penyusunan profil PNS dalam rekap jabatan PTP, Administrator, Pengawas dan Fungsional.	21	3	3	3	100	3	9	42,86
		Terlaksananya penyusunan profil PNS dalam rekap jabatan struktural								
		Evaluasi Jabatan PTP dan Administrator melalui Quisioner.								
		Terlaksananya								
		Pengangkatan/Penyesuaian/Pemberhentian PNS Kota Sungai Penuh dalam jabatan Fungsional								
4 5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100	80	20	20	100	100	84,00	84,00
4 5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pemberian Tugas Belajar	350	50	50	74	148	50	174	49,71
		Terlaksananya Pemberian Izin Belajar								
4 5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100	80	20	20	100	100	84,00	84,00
4 5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1) Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi SKP Online; 2) Persentase Pelaksanaan Asistensi Penetapan SKP, 3) Persentase Terhimpunnya SKP 2021 4) Persentase Terhimpunnya SKP Awal 2021, 5) Persentase Fasilitas Absensi Elektronik;	84	12	12	12	100	12	36	42,86
4 5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Inventarisasi data calon penerima Satya lencana Penetapan pengusulan penerima satya lencana Pengusulan Satya lencana ke lembaga terkait Pelaksanaan Penilaian PNS Teladan	700	100	100	131	131	100	231	33,00
4 5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah / Janji PNS, Terlaksananya Proses Penerbitan Surat Cuti PNS, Terlaksananya Proses Penerbitan Surat Izin keluar Daerah bagi PNS Penerbitan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	3400	1599	2882	1599	55,48	55	3.198	94,06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengawasan tes urine bagi PNS								
		Terlaksananya Proses Penanganan kasus Pelanggaran Disiplin PNS, Terlaksananya Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS (Tim PPHD).								
		Terlaksananya Inspeksi Mendadak (SIDAK) pada SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, Terlaksananya Proses Penerbitan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS (SPTDHD)								
		Terlaksananya Proses izin perceraian PNS sesuai ketentuan (mediasi untuk merukunkan rumah tangga), terlaksananya penyusunan karis/karsu	21	3	3	3	100	3	9	42,86
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terlaksananya pengawasan atas tindak lanjut TPTGR								
		Facilitasi dan pengendalian LHKPN secara online bagi pejabat yang wajib, Facilitasi media pengumuman LHKPN, menyampaikan LHKPN								
		1) Persentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis setiap tahunnya; 2) Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 3) Persentase PNS yang telah mengikuti diklat fungsional;	100	80	20	20,34	102	80	84,07	84,07
		Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	100	83,33	16,67	16,67	100	100	86,67	86,67
4 5 04 02 2.01 03	Pengembangan Kompetensi Teknis	Facilitasi PNS yang Akan Mengikuti Diklat Widyaiswara, MOT, TOT, TOC dan Diklat Asesor								
4 5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Facilitasi Pelaksanaan Diklat Non Gelar bagi PNS Daerah								
		Facilitasi Penerbitan Rekomendasi Diklat bagi Aparatur Lingkup Pemerintah Kota sungai Penuh								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4 5 04 02 2.02		Fasilitasi PNS yang Akan Mengikuti Program Inpassing Untuk Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu	560	125	80	125	156,25	80	330	58,93
		Tersusunnya Regulasi Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PNS								
		Terlaksananya Pembekalan / Pelatihan bagi PNS yang Memasuki Purna Tugas								
		Terlaksananya Rapat Kebutuhan Diklat								
4 5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00	80,00	20,00	24,00	120	60	84,80	84,80
4 5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1) Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Kenalkan Pangkat dan Ujian Kenalkan Pangkat Penyesuaian Ijazah,	360	45	60	45	75	60	150	41,67
4 5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2) Jumlah SKPD yang difasilitasi Mengikuti Talent pool ASN								
		Terlaksananya Pengiriman Peserta Diklatpim Pejabat BKPSDM dan Fasilitasi Peserta Diklat Pim bagi Pejabat Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh								
		Fasilitasi Pengiriman Peserta diklat struktural lainnya								
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kediklatan								
		Terfasilitasinya Surat Edaran dari Walikota Sungai Penuh untuk pengiriman peserta Diklat PIM	42	3	6	3	50	6	12	28,57
		Terlaksananya Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Jabatan Fungsional Tertentu								
		Terlaksananya Pembekalan/Pelatihan Bagi PNS yang memasuki purna tugas								
		Terbanggunya Sistem Informasi Kediklatan berbasis TI								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara. Dalam mengukur hasil pelayanan yang digunakan indikator kinerja kunci yang sudah ditentukan dalam SPM maupun indikator kunci yang ditetapkan secara mandiri oleh SKPD.

Pelayanan bidang kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil tampak berhasil jika didukung oleh :

- 1) Kuantitas dan kualitas pegawai
 - 2) Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi
 - 3) Sarana dan Prasarana Pendukung untuk pelaksanaan tugas
 - 4) Memiliki Kompetensi pada bidang tugasnya masing-masing.
1. Permasalahan dan Solusi
- a. Permasalahan
- 1) Jumlah selesainya SK Pensiun sesuai peraturan.
Dengan adanya perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan, mengakibatkan Batas Usia Pensiun (BUP) diperpanjang.
 - 2) Masih kurangnya tenaga yang profesional di bidang kepegawaian;
 - 3) Masih banyaknya pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan;
 - 4) Masih banyaknya pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat teknis;
 - 5) Kondisi pegawai negeri sipil masih kurang sesuai dengan formasi yang ada baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - 6) Mahalnya biasa assesment untuk menempatkan pejabat dalam JPTP dan banyaknya pihak yang terlibat seperti KASN, Kemendagri dan lain sebagainya. Hal ini ditambah dengan belum adanya standar kompetensi jabatan untuk pejabat administrator dan fungsional sehingga pengangkatan pns dalam jabatan tersebut hanya dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan hasil rapat Tim Penilai Kinerja. Disamping itu masih terdapatnya jabatan lowong di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dikarenakan PNS daerah Kota Sungai Penuh yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi jabatan tersebut belum memenuhi persyaratan kepegawaian sebagai mana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pemecahan Masalah / Solusi

a) Kegiatan Jangka Pendek

- 1) Tercapainya pelayanan administrasi pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG dan BAPERTARUM dengan tepat waktu;
- 2) Mengadakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah terhadap PNS Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan SOP;
- 3) Menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat secara langsung kepada unit pegawai yang bersangkutan;
- 4) Pemberian reward / penghargaan terhadap PNS, salah satunya pengajuan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari presiden;
- 5) Mengadakan pengangkatan CPNS dan atau seleksi penerimaan CPNS Kota Sungai Penuh.
- 6) Penghematan pada anggaran Assesment dengan melibatkan sumber pembiayaan dari SKPD terkait;

b) Kegiatan Jangka Panjang

- 1) Perlu adanya penambahan anggaran kegiatan mengingat banyaknya output kegiatan yang harus dicapai;
- 2) Mengadakan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, terhadap regulasi peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan;
- 3) Meningkatkan Mendidik dengan mengikutsertakan kursus-kursus yang diadakan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi maupun Pusat;
- 4) Menginventarisir, mengevaluasai dan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dari unit kerja terhadap disiplin PNS.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kota Sungai Penuh

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021 (thn n- 2)	2022 (thn n- 1)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)	2021 (thn n-2)	2022 (thn n-1)	2023 (thn n)	2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%				100%				
2.	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%				100%				
3.	Terbangunnya Bandiklatda/CAT			90,00%				0,00%				
4.	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur			100%				100%				
5.	Tertib Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%				100%				
6.	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan			97,00%				94,39%				
7.	Persentase tingkat Pendidikan aparatur yang berpendidikan S1, S2, S3			67,85%				73,21%				
8.	Persentase Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan kompetensinya.			80,00%				85,39%				
9.	Menurunnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS			3 /1000 ASN				1,04/1000 ASN				
10.	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu			100%				100%				
11.	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian			A				A				
12.	Persentase updating data kepegawaian			95%				95,00%				
13.	Persentase PNS yang telah mengikuti diklat fungsional			82,00%				86,86%				
14.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%				100%				
15.	Persentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis setiap tahunnya.			15,00%				75,00%				
16.	Indeks Profesionalitas ASN				Rendah	Rendah	Sedang			Rendah	Sedang	
17.	Indeks Sistem Merit				0,53	0,56	0,61			0,56	0,61	
18.	Nilai Evaluasi SAKIP BKPSDM				B	BB	BB			BB	BB	
19.	Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM				Rendah	Rendah	Sedang			Rendah	Sedang	
20.	Persentase ASN yang memenuhi Syarat Kualifikasi				82	84	86			84	86	
21.	Persentase ASN yang memenuhi Syarat Kompetensi				87	89	91			89	91	
22.	Persentase ASN Berkinerja Baik				100	100	100			100	100	
23.	Persentase ASN yang tidak terdapat hukuman pelanggaran disiplin				94	95	96			95	96	
24.	Nilai Capaian Penerapan Sistem Merit (8 Aspek)				212	224	244			224	244	
25.	Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja ASN				100	100	100			100	100	
26.	Persentase Keterisian Jabatan				93	94	95			94	95	
27.	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN				82	83	84			83	84	
28.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				83	84	85			84	85	

29.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				15	30	45			30	45	
30.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				100	100	100			100	100	
31.	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan				87	89	91			89	91	
32.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan				20,10	20,20	20,30			20,20	20,30	
33.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal				5,00	5,25	5,50			5,25	5,50	
34.	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural				45,00	50,00	55,00			50,00	55,00	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan PTT (Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer).

Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran ; (1) pegawai honor atau yang lebih dikenal dengan istilah pegawai tidak tetap (PTT). Sebagai gantinya, nantinya pegawai yang bukan pegawai negeri sipil (PNS) akan memiliki status baru, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); (2) Jumlah PTT lebih banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki; (3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten.
2. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat/Terjadi perubahan kebijakan pusat dalam pengelolaan kediklatan aparatur.

Dimana kesempatan mengikuti diklat tidak saja dipandang sebagai kewajiban Pemerintah Daerah tetapi lebih jauh merupakan hak bagi seorang PNS. Kerjasama dengan badan diklat dijadikan isu strategis lantaran; (1) perlu peningkatan kualitas kinerja aparatur yang lebih baik seiring dengan permasalahan dan lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang, (2) adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang diberikan aparatur.
3. Peningkatan sarana dan prasarana.

Saat ini Pemerintah Kota Sungai Penuh belum memiliki sarana dan prasarana bandiklatda/CAT sehingga untuk proses pendidikan dan pengembangan aparatur masih memanfaatkan sarana dan prasarana diluar daerah. Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran; (1) kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi pelayanan kepada pegawai,

- (2) perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK).
4. Penerapan regulasi/Terjadi perubahan peraturan dalam pembinaan kepegawaian.
- Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran; (1) Rancangan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak Januari 2014 sudah diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ada banyak perubahan aturan kepegawaian, selain penambahan masa usia pensiun sebanyak dua tahun, diantaranya ada juga penghapusan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). (2) tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, (3) pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai, (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah tentunya akan ada beberapa wewenang Pemerintah Daerah yang menjadi wewenang Provinsi dan juga pusat.
5. Teknologi informasi kepegawaian menjadi kebutuhan yang sangat penting didalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian. Terjadinya perubahan kebijakan rekrutmen pegawai negeri sipil dari sistem LJK (Lembar Jawaban Komputer) menjadi system CAT (*Computer Assisted Test*).
6. Pemberdayaan PNS dalam jabatan, lebih dikembangkan pada jabatan fungsional.
7. Tumpang tindih (*missmatch*) kebijakan antara lembaga dalam hal pengembangan pegawai melalui pendidikan tugas belajar dan ijin belajar.
8. Belum kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi bidangnya khususnya pelayanan publik.
9. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*), dan kinerjanya rendah (*under performance*).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi keutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BKPSDM dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKPSDM, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD telah memuat rancangan awal program dan kegiatan dan telah disusun melalui proses perencanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta rencana pencapaian tahun 2023. Seiring dengan perkembangan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan SKPD untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian –

penyesuaian yang dilakukan tentunya harus tetap mengacu pada visi, misi Kepala Daerah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh setelah melakukan analisis terhadap rancangan awal RKPD yang dikaitkan dengan kebutuhan dan isu/permasalahan terkini melakukan beberapa perubahan/penyesuaian terhadap beberapa program/kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal RKPD, yaitu antara lain :

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
 KOTA SUNGAI PENUH

No	Kode	Indikator Kinerja			Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	5	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				6.676.074.724	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			9.935.312.564
		KEPEGAWAIAN				6.478.633.120	KEPEGAWAIAN			9.464.111.164
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sungai Penuh	1) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik; 2) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bintek; 3) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 4) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawain, administrasi umum dan jasa penunjang pemerintahan daerah; 5) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	5.313.904.032	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik; 2) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bintek; 3) Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 4) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawain, administrasi umum dan jasa penunjang pemerintahan daerah; 5) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah;	1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	5.313.904.032
I	5 03 01 2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100%	298.300.200	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD	100%	298.300.200

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sungai Penuh	1) Jumlah Dokumen Renja Murni SKPD, 2) Jumlah Dokumen Renja Perubahan SKPD, 3) Jumlah Dokumen KAK SKPD, 4) Jumlah Dokumen SOP SKPD, 5) Jumlah Dokumen RKT SKPD, 6) Jumlah Dokumen Rencana Aksi SKPD, 7) Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD	6 Dokumen, 1 Berita Acara	55.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Renja Murni SKPD, 2) Jumlah Dokumen Renja Perubahan SKPD, 3) Jumlah Dokumen KAK SKPD, 4) Jumlah Dokumen SOP SKPD, 5) Jumlah Dokumen RKT SKPD, 6) Jumlah Dokumen Rencana Aksi SKPD, 7) Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD	6 Dokumen, 1 Berita Acara	55.000.000
2	5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sungai Penuh	1) Jumlah Dokumen Arus Kas SKPD, 2) Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD, 3) Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD, 4) Jumlah Dokumen RKA Murni SKPD, 5) Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD, 6) Jumlah Dokumen RKBMD SKPD	6 Dokumen	37.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1) Jumlah Dokumen Arus Kas SKPD, 2) Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD, 3) Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD, 4) Jumlah Dokumen RKA Murni SKPD, 5) Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD, 6) Jumlah Dokumen RKBMD SKPD	6 Dokumen	37.400.000
3	5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sungai Penuh	1) Jumlah Dokumen Realisasi fisik dan keuangan SKPD, 2)Jumlah dokumen SPJ Keuangan yang dikelola, 3) Jumlah Laporan E-Monev SKPD, 4) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP) KPK, 5) Jumlah Dokumen Pengelolaan Website SKPD, 6) Jumlah Dokumen PMPRB SKPD, 7) Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	7 Laporan	103.039.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1) Jumlah Dokumen Realisasi fisik dan keuangan SKPD, 2)Jumlah dokumen SPJ Keuangan yang dikelola, 3) Jumlah Laporan E-Monev SKPD, 4) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP) KPK, 5) Jumlah Dokumen Pengelolaan Website SKPD, 6) Jumlah Dokumen PMPRB SKPD, 7) Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	7 Laporan	103.039.200

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sungai Penuh	1) Jumlah dokumen LKJP SKPD, 2) Jumlah dokumen LKPJ SKPD, 3) Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja SKPD, 4) Jumlah Dokumen LPPD SKPD, 5) Jumlah Dokumen Data Base Indikator Kepegawaian, 6) Jumlah Dokumen Pakta Integritas SKPD, 7) Jumlah Dokumen SPIP SKPD, 8) Jumlah Dokumen PPID SKPD, 9) Persentase pelaksanaan SAKIP SKPD	7 Laporan	102.861.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen LKJP SKPD, 2) Jumlah dokumen LKPJ SKPD, 3) Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja SKPD, 4) Jumlah Dokumen LPPD SKPD, 5) Jumlah Dokumen Data Base Indikator Kepegawaian, 6) Jumlah Dokumen Pakta Integritas SKPD, 7) Jumlah Dokumen SPIP SKPD, 8) Jumlah Dokumen PPID SKPD, 9) Persentase pelaksanaan SAKIP SKPD	7 Laporan	102.861.000	
ii	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen/ laporan keuangan	100%	3.805.353.476	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.805.353.476	
1	5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Penuh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bln	3.509.387.476	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bln	3.509.387.476	
2	5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	65.340.000	
3	5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.284.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	130.284.000	
4	5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	78.342.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	78.342.000	
4	5 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	22.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	22.000.000	

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
III	5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	299.179.096	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	299.179.096			
				Persentase pengadaan pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN serta Bintek/ Sosialisasi dan Diklat									
				Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Paket	114.022.096	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	114.022.096	sesuai		
	5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		40.000.000				40.000.000	sesuai		
2	5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sungai Penuh	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	145.157.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	145.157.000	sesuai		
IV	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Penuh	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	280.716.260	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	280.716.260			
1	5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	11.000.000			
2	5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	27.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	27.500.000			
3	5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.435.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.435.500			
4	5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	14.180.760	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	14.180.760			

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Paket	12.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Paket	12.100.000		
6	5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	192.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	192.500.000		
V	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100%	304.699.560	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	304.699.560		
1	5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Sungai Penuh	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	304.699.560	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	304.699.560		
VI	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100%	242.055.440	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	100%	242.055.440		
1	5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	5.555.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	12 Laporan	5.555.000		
2	5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	187.000.440	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	187.000.440		
3	5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	49.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	49.500.000		
VII	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.600.000		

No		Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total	
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Sungai Penuh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	71.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	71.500.000	
	2	5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sungai Penuh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	12.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	12.100.000	
II	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sungai Penuh	Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) PNS (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pelaporan kinerja ASN	Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pelaporan kinerja ASN	1.164.729.088	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pelaporan kinerja ASN	Persentase keterisian jabatan Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan); Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tingkat pelaporan kinerja ASN	4.150.207.132		
I	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sungai Penuh	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	669.961.461	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	1.691.978.400		

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (1) Dokumen jumlah fasilitas pengadaan CPNS (160 org); 2) Dokumen jumlah fasilitas pengadaan PPPK (45 org)	2 Dokumen	477.983.061	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK (1) Dokumen jumlah fasilitas pengadaan CPNS (160 org); 2) Dokumen jumlah fasilitas pengadaan PPPK (45 org)	2 Dokumen	1.500.000.000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (1) Jumlah SK pensiun PNS (150 org); 2) Jumlah Kartu Taspen yang terbit (160 org)	2 Dokumen	69.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (1) Jumlah SK pensiun PNS (150 org); 2) Jumlah Kartu Taspen yang terbit (160 org)	2 Dokumen	69.000.000	
3	5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen Jumlah update data pegawai yang berbasis SAPK (3.100 org)	1 Dokumen	62.905.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen Jumlah update data pegawai yang berbasis SAPK (3.100 org)	1 Dokumen	62.905.000	
4	5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen Jumlah pengelolaan arsip kepegawaian elektronik/digital (3.100 org)	1 Dokumen	60.073.400	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen Jumlah pengelolaan arsip kepegawaian elektronik/digital (3.100 org)	1 Dokumen	60.073.400	
II	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Sungai Penuh	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100%	182.782.430	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Mutasi dan Promosi ASN	100%	1.950.054.052	
1	5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Sungai Penuh dan Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (1) Penetapan formasi Mutasi PNS (50 org); 2) Pelaksanaan seleksi mutasi masuk PNS (50 org); 3) penerbitasn SK rekomendasi menerima, SK rekomendasi melepas dan SK penempatan (50 org)]	3 Dokumen	32.648.808	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (1) Penetapan formasi Mutasi PNS (50 org); 2) Pelaksanaan seleksi mutasi masuk PNS (50 org); 3) penerbitasn SK rekomendasi menerima, SK rekomendasi melepas dan SK penempatan (50 org)]	3 Dokumen	97.061.520	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Sungai Penuh	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN [1] Dokumen laporan kenaikan pangkat PNS (800 org); 2) Dokumen laporan kenaikan gaji berkala otomatis (1.400 org)]	2 Dokumen	52.183.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN [1] Dokumen laporan kenaikan pangkat PNS (800 org); 2) Dokumen laporan kenaikan gaji berkala otomatis (1.400 org)]	2 Dokumen	153.522.000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
3	5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN [1] Dokumen nominasi PNS yang memenuhi syarat dalam jabatan administrasi (2) proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dalam jabatan administrasi (3) Profil ASN dalam jabatan Administrasi, JPT Pratama, (4) Seleksi terbuka terhadap 12 JPT Pratama), (5) Pelaksanaan uji kompetensi/asesment 12 jabatan	3 Dokumen	97.950.622	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN [1] Dokumen nominasi PNS yang memenuhi syarat dalam jabatan administrasi (2) proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dalam jabatan administrasi (3) Profil ASN dalam jabatan Administrasi, JPT Pratama, (4) Seleksi terbuka terhadap 12 JPT Pratama), (5) Pelaksanaan uji kompetensi/asesment 12 jabatan	3 Dokumen	1.699.470.532	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
III	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Sungai Penuh	Persentase ASN berkembang kompetensinya	100%	136.809.609	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	161.720.000	
1	5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center [Dokumen laporan ASN yang mengikuti proses Assessment]	1 Dokumen	0	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center [Dokumen laporan ASN yang mengikuti proses Assessment]	1 Dokumen	0	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
5	03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan [Jumlah pemberian izin belajar; jumlah pemberian tugas belajar; jumlah perubahan status pendidikan PNS;500org]	50 Orang	71.809.609				96.720.000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
5	03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Sungai Penuh	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina [Jumlah penataan PNS Jabatan Fungsional;150 org]	150 Orang	65.000.000				65.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH



Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama tahun 2023 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal), yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 yang terkait dengan pembangunan seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi, politik dan keamanan.

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja yang diharapkan adalah terwujudnya rasio jumlah Pegawai Negeri Sipil terhadap jumlah penduduk 1 : 30.

Kebijakan Provinsi yang terkait dengan agenda pembangunan nasional yang signifikan terdapat pada agenda ke 7 (tujuh), yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun arah kebijakan yang ditempuh untuk agenda tersebut meliputi :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah;
2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap kebijakan nasional dan provinsi dilakukan melalui kegiatan seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan seleksi sekolah kedinasan yang saat ini masih menjadi kewenangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan ketersediaan aparatur yang berkualitas dan profesional yang ada di daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Disamping prioritas di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh juga memiliki prioritas program diantaranya, yaitu:

1. Tersedianya tenaga yang profesional dibidang kepegawaian yang dapat mengelola Sistem Informasi Pegawai dengan baik, mengelola data kepegawaian dengan baik, membuat data fisik Pegawai Negeri Sipil yang akurat, menyediakan data jumlah pegawai yang tepat, mengelola kenaikan pangkat dan pensiun tepat pada waktunya serta memberikan cuti dan penghargaan yang proporsional;
2. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;
3. Ikut sertanya seluruh pejabat struktural dalam Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
4. Ikut sertanya seluruh pejabat fungsional dalam Diklat Teknis dan Fungsional, sehingga dapat melaksanakan tugas – tugas yang dihadapi dengan baik;
5. Terisinya formasi seluruh jabatan struktural dan fungsional sehingga urusan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan lancar.

3.2. Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi, dan menjadi ukuran kinerja. Tujuan akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam beberapa tahun mendatang. Dengan demikian dalam pernyataan tujuan harus diungkapkan mengenai apa yang akan dicapai dan kapan akan dicapai. Pernyataan tujuan bersifat lebih nyata yang mengarah pada pencapaian hasil akhir pada suatu periode tertentu misalnya satu sampai lima tahun. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Sungai Penuh telah menyelaraskan program/kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang akan diambil. Dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota Sungai Penuh maka dirumuskan kebijakan strategi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan yang ingin dicapai BKPSDM Kota Sungai Penuh adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional, akuntabel, transparan dan mengayomi di BKPSDM.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan mengayomi di BKPSDM.
- c. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
- d. Meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran strategis BKPSDM Kota Sungai Penuh adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM.
2. Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur di BKPSDM.
3. Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN.
4. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN.

3.3. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka harus didukung program dan kegiatan untuk pelaksanaan pembangunan kepegawaian pada tahun 2023. Namun terdapat rumusan pagu indikatif program/kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam aplikasi SIPD, yaitu pada program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam hal menindaklanjuti kebijakan Walikota Sungai Penuh selama mengikuti Pembekalan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Walikota Sungai Penuh berisi program dan kegiatan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang berorientasi pada pengembangan dimensi Kompetensi yang diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, salah satunya dengan pelaksanaan diklat dikalangan ASN. Salah satu langkah yang dianggap tepat dihubungkan dengan upaya peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Kota Sungai Penuh adalah dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan salah satunya adalah Diklat PIM II dan Diklat PIM III (PKA) disamping diklat-diklat lainnya.

Pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Profesional ASN Kota Sungai Penuh semakin menurun tajam di angka 59,0 dan 21,00 berada pada posisi rentang nilai sangat rendah (sangat tidak profesional) yang di pengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Pelaporan yang tidak terdokumentasikan dengan baik.
- b. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang belum terorganisir dengan baik.
- c. Pelaksanaan pendidikan pelatihan yang belum terintegrasi dengan Instansi yang mempunyai tugas pokok dalam hal pengembangan SDM.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian pagu indikatif agar Rencana Aksi Walikota/Wakil Walikota yang berisi program dan kegiatan terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat terwujud dan indeks Profesional ASN naik.

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 KOTA SUNGAI PENUH

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	5	UNSUB PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH				9.935.312.564				7.477.979.643
5 03		KEPEGAWAIAN				9.464.111.164				7.274.507.061
5 03 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1) Persentase Aparatur BKPSDM yang berkinerja baik; 2) Persentase Aparatur BKPSDM yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bintek; 3)Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja; 4) Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;5) Persentase pengadaan / pemeliharaan barang mitik daerah;		1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	5.313.904.032			1) 100%; 2) 100%; 3) 100%; 4) 100%; 5) 100%;	5.476.220.579
I	5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi SKPD		100%	298.300.200			100%	328.130.220
1	5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Renja Murni SKPD, 2) Jumlah Dokumen Renja Perubahan SKPD, 3) Jumlah Dokumen KAK SKPD, 4) Jumlah Dokumen SOP SKPD, 5) Jumlah Dokumen RKT SKPD, 6) Jumlah Dokumen Rencana Aksi SKPD, 7) Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum SKPD	Sungai Penuh	6 Dokumen, 1 Berita Acara	55.000.000	APBD II		6 Dokumen, 1 Berita Acara	60.500.000
2	5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1) Jumlah Dokumen Arus Kas SKPD, 2) Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD, 3) Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD, 4) Jumlah Dokumen RKA Murni SKPD , 5) Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD, 6) Jumlah Dokumen RKBMD SKPD	Sungai Penuh	6 Dokumen	37.400.000	APBD II		6 Dokumen	41.140.000

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1) Jumlah Dokumen Realisasi fisik dan keuangan SKPD, 2)Jumlah dokumen SPJ Keuangan yang dikelola, 3) Jumlah Laporan E-Monev SKPD, 4) Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP) KPK, 5) Jumlah Dokumen Pengelolaan Website SKPD, 6) Jumlah Dokumen PMPRB SKPD, 7) Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Sungai Penuh	7 Laporan	103.039.200	APBD II		7 Laporan	113.343.120
4	5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Jumlah dokumen LKJIP SKPD, 2) Jumlah dokumen LKPJ SKPD, 3) Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja SKPD, 4) Jumlah Dokumen LPPD SKPD, 5) Jumlah Dokumen Data Base Indikator Kepegawain, 6) Jumlah Dokumen Pakta Integritas SKPD, 7) Jumlah Dokumen SPIP SKPD, 8) Jumlah Dokumen PPTD SKPD, 9) Persentase pelaksanaan	Sungai Penuh	7 Laporan	102.861.000	APBD II		7 Laporan	113.147.100
II	5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sungai Penuh	100%	3.805.353.476	APBD II		100%	3.837.594.263
1	5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sungai Penuh	50 Orang/bln	3.509.387.476	APBD II		50 Orang/bln	3.512.031.663
2	5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sungai Penuh	12 Dokumen	65.340.000	APBD II		12 Dokumen	71.874.000
3	5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sungai Penuh	12 Dokumen	130.284.000	APBD II		12 Dokumen	143.312.400

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			4	5	6	7	8	9	10	11		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sungai Penuh	1 Laporan	78.342.000	APBD II	1 Laporan	10	86.176.200			
4	5 03 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sungai Penuh	1 Dokumen	22.000.000	APBD II	1 Dokumen		24.200.000			
iii	5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Penuh	100%	299.179.096	APBD II		100%	308.317.710			
1	5 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sungai Penuh	60 Paket	114.022.096	APBD II	60 Paket		117.112.710			
2	5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.000.000	APBD II			40.000.000			
3	5 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sungai Penuh	20 Orang	145.157.000	APBD II	20 Orang		151.205.000			
IV	5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	Sungai Penuh	100%	280.716.260	APBD II		100%	308.787.886			
1	5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sungai Penuh	17 Paket	11.000.000	APBD II	17 Paket		12.100.000			
2	5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		43 Paket	27.500.000	APBD II	43 Paket		30.250.000			
3	5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sungai Penuh	3 Paket	23.435.500	APBD II	3 Paket		25.779.050			
4	5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sungai Penuh	5 Paket	14.180.760	APBD II	5 Paket		15.598.836			
5	5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		3 Paket	12.100.000	APBD II	3 Paket		13.310.000			
6	5 03 01 2.06 09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sungai Penuh	20 Laporan	192.500.000	APBD II	20 Laporan		211.750.000			
V	5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mitik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	100%	304.699.560	APBD II		100%	335.169.516			

No	Kode	Indikator Kinerja					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Total	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh	Persentase Pelaksanaan dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		175.175.588	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0%	346.454.680	
1	5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (1) Jumlah Pelaksanaan SKP Online/ SIMPEG Terintegrasi SAPK BKN (1 kali); 2) Persentase Pelaksanaan Asistensi Penetapan SKP (100%); 3) Persentase Terhimpunannya SKP 2023 (100%); 4) Persentase Terhimpunnya SKP Awal 2023 (100%); 5) Persentase Absensi Online (100%); 6) Tersedianya aplikasi SIMPEG terintegrasi SAPK BKN.	12 Dokumen	60.618.189	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (1) Jumlah Pelaksanaan SKP Online/ SIMPEG Terintegrasi SAPK BKN (1 kali); 2) Persentase Pelaksanaan Asistensi Penetapan SKP (100%); 3) Persentase Terhimpunannya SKP 2023 (100%); 4) Persentase Terhimpunnya SKP Awal 2023 (100%); 5) Persentase Absensi Online (100%); 6) Tersedianya aplikasi SIMPEG terintegrasi SAPK BKN.	12 Dokumen	134.653.880	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD
2	5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (1) Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan satya lencana karya satya atas pengabdian PNS (100 Organg); 2) Pelaksanaan Penilaian PNS Teladan (3 PNS)	100 Orang	46.500.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (1) Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan satya lencana karya satya atas pengabdian PNS (100 Organg); 2) Pelaksanaan Penilaian PNS Teladan (3 PNS)	100 Orang	62.500.000	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (1) Jumlah Karis (100 karis); 2) Jumlah Karsu (100 karsu); 3) Jumlah monitoring dan evaluasi disiplin PNS per triwulan (4 Laporan); 4) Jumlah penerbitan surat izin penerbitan surat izin keluar daerah (50 surat); 5) Jumlah proses izin perseraian PNS sesuai ketentuan (mediasi untuk merukunkan rumah tangga PNS) (10 kasus/mediasi) 7) Jumlah sumpah PNS (30 org)	3100 Orang	38.080.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (1) Jumlah Karis (100 karis); 2) Jumlah Karsu (100 karsu); 3) Jumlah monitoring dan evaluasi disiplin PNS per triwulan (4 Laporan); 4) Jumlah penerbitan surat izin penerbitan surat izin keluar daerah (50 surat); 6) Jumlah proses izin perseraian PNS sesuai ketentuan (mediasi untuk merukunkan rumah tangga PNS) (10 kasus/mediasi) 7) Jumlah sumpah PNS (30 org)	3100 Orang	56.866.800	Mengako modir prog. Prioritas RPJMD

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan	
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (1) Jumlah laporan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) (4 kali); 2) Jumlah pelaksanaan pemberian sanksi hukuman disiplin PNS (3 hukuman); 3) Jumlah fasilitas dan pengendalian e-LHKPN secara online terhadap Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan rincian: 1. Walikota; 2. Wakil Walikota; 3. Seluruh JPT Walikota; 3. Seluruh JPT Pratama; 4. Seluruh Pejabat Administrator; 5. Seluruh Pejabat Pengawas Lingkup PUPR, PTSP dan Perizinan; 6. Seluruh pejabat Inspektorat, Bagian ULP, Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat; 7. Seluruh pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa; 8. Seluruh	3 Laporan	29.977.399	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (1) Jumlah laporan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) (4 kali); 2) Jumlah pelaksanaan pemberian sanksi hukuman disiplin PNS (3 hukuman); 3) Jumlah fasilitas dan pengendalian e-LHKPN secara online terhadap Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan rincian: 1. Walikota; 2. Wakil Walikota; 3. Seluruh JPT Walikota; 4. Seluruh Pejabat Administrator; 5. Seluruh Pejabat Pengawas Lingkup Bakeuda, PUPR, PTSP dan Perizinan; 6. Seluruh pejabat Inspektorat, Bagian ULP, Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat; 7. Seluruh pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa; 8. Seluruh Bendahara Pengeluaran APBD.	3 Laporan	92.434.000	Mengakomodir Prioritas RPJMD
5 04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				197.441.604	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			471.201.400	
I	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sungai Penuh		1) 5,2 % 2) 89 % 3) 50 % 4) 20,2 JP	197.441.604	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1) 5,2 % 2) 89 % 3) 50 % 4) 20,2 JP	471.201.400	
I	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sungai Penuh	Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	75%	9.333.864	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	75%	71.201.400	

No	Kode	Indikator Kinerja				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan		
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi [1] Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat teknis 2)Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti uji kompetensi; 3)Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat pembekalan PNS yang memasuki purna tugas]	30 Peserta 15 Orang	9.333.864	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi [1] Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat teknis 2)Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti uji kompetensi; 3)Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat pembekalan PNS yang memasuki purna tugas]	30 Peserta 15 Orang	71.201.400	Mengako modir. Prioritas RPJMD	
II	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sungai Penuh	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	60%	188.107.740	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	60%	400.000.000		
1	5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sungai Penuh	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota [Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,]	60 Orang	9.657.380	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota [Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,]	60 Orang	50.000.000	Mengako modir. Prioritas RPJMD	
2	5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Sungai Penuh	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan [1]Jumlah peserta diklatpim II (6 org); 2) Jumlah fasilitasi pengiriman peserta diklatpim III (36); 3)Jumlah fasilitasi pengiriman peserta diklatpim IV (34); 4) Jumlah peserta diklat struktural lainnya; 5) Jumlah peserta diklat angka kredit; 6) Jumlah	6 Laporan	178.450.360	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan [1]Jumlah peserta diklatpim II (6 org); 2) Jumlah fasilitasi pengiriman peserta diklatpim III (36); 3)Jumlah fasilitasi pengiriman peserta diklatpim IV (34); 4) Jumlah peserta diklat struktural lainnya; 5) Jumlah peserta diklat angka kredit; 6) Jumlah	6 Laporan	350.000.000	Mengako modir. Prioritas RPJMD	
JUMLAH						6.676.074.724	JUMLAH				9.935.312.564	

2.5. Penalaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penalaahan usulan program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Pengumpulan informasi tersebut dapat dilakukan dengan penelitian lapangan keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang (kabupaten/kota). Untuk tahun 2023 tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023

Berkaitan dengan isu – isu penting yang menjadi prioritas program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023, usulan tersebut diatas secara umum akan diakomodir tentunya dengan menyesuaikan kriteria teknis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan		Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
					Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	5 03 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Sungai Penuh	4 unit	304.699.560	APBD II		4 unit	335.169.516
VI	5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pelayanan administrasi dan Persentase pelayanan sarana dan prasarana perkantoran	Sungai Penuh	100%	242.055.440	APBD II		100%	266.260.984
I	5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Sungai Penuh	12 Laporan		5.555.000	APBD II	12 Laporan	6.110.500
2	5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan		187.000.440	APBD II	4 Laporan	205.700.484
3	5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sungai Penuh	2 Laporan		49.500.000	APBD II	2 Laporan	54.450.000
VII	5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sungai Penuh	100%	83.600.000	APBD II		100%	91.960.000
1	5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 unit		71.500.000	APBD II	5 unit	78.650.000
2	5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sungai Penuh	3 unit		12.100.000	APBD II	3 unit	13.310.000

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	5 03 02	PROGRAM KEPEGAWALAN DAERAH	4	5	6	7	8	9	10	11
II	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase keterisian jabatan ASN Persentase keterpenuhan formasi ASN Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan; Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan; Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan; Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Tingkat pelaporan kinerja ASN	Sungai Penuh		4.150.207.132	APBD II		0	1.798.286.482
I	5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Sungai Penuh	100%	1.691.978.400	APBD II		100%	964.988.575
1	5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (1) Dokumen jumlah fasilitasi pengadaan CPNS (160 org); 2) Dokumen jumlah fasilitasi pengadaan PPPK (45 org)		2 Dokumen	1.500.000.000	APBD II		2 Dokumen	753.812.335
2	5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (1) Jumlah SK pensiun PNS (150 org); 2) Jumlah Kartu Taspen yang terbit (160 org)	Sungai Penuh	2 Dokumen	69.000.000	APBD II		2 Dokumen	75.900.000
3	5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen Jumlah update data pegawai yang berbasis SAPK (3.100 org)	Sungai Penuh	1 Dokumen	62.905.000	APBD II		1 Dokumen	69.195.500
4	5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen Jumlah pengelolaan arsip kepegawaian elektronik/digital (3.100 org)	Sungai Penuh	1 Dokumen	60.073.400	APBD II		1 Dokumen	66.080.740
II	5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Sungai Penuh	100%	1.950.054.052	APBD II		100%	263.273.288

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah (1) Penetapan formasi Mutasi PNS (50 org); 2) Pelaksanaan seleksi mutasi masuk PNS (50 org); 3) penerbitan SK rekomendasi menerima, SK rekomendasi melepas dan SK penempatan (50 org)]	Sungai Penuh	3 Dokumen	97.061.520	APBD II		3 Dokumen	48.139.666
2	5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (1) Dokumen laporan kenaikan pangkat PNS (800 org); 2) Dokumen laporan kenaikan gaji berkala otomatis (1.400 org)]	Sungai Penuh	2 Dokumen	153.522.000	APBD II		2 Dokumen	70.183.000
3	5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (1) Dokumen nominasi PNS yang memenuhi syarat dalam jabatan administrasi (2) proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dalam jabatan administrasi (3) Profil ASN dalam jabatan Administrasi, JPT Pratama, (4) Seleksi terbuka terhadap 12 JPT Pratama), (5) Pelaksanaan uji kompetensi/ asesment 12 jabatan	Sungai Penuh	3 Dokumen	1.699.470.532	APBD II		3 Dokumen	144.950.622
III	5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN berkembang kompetensinya	Sungai Penuh	100%	161.720.000	APBD II		100%	317.707.955
1	5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen laporan ASN yang mengikuti proses Assessment)	Sungai Penuh	1 Dokumen	0	APBD II		1 Dokumen	172.717.385
2	5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Jumlah pemberian izin belajar; jumlah pemberian tugas belajar; jumlah perubahan status pendidikan PNS;50org]	Sungai Penuh	50 Orang	96.720.000	APBD II		50 Orang	78.990.570
3	5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Sungai Penuh	5 Dokumen	0	APBD II		5 Dokumen	0
4	5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina [Jumlah penataan PNS Jabatan Fungsional;150 org]	Sungai Penuh	150 Orang	65.000.000	APBD II		150 Orang	66.000.000
IV	5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sungai Penuh		346.454.680	APBD II		0%	252.316.664

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan				Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	5 03 02 2.04 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (1) Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi SKP Online/ SIMPEG Terintegrasi SAPK BKN (1 kali); 2)Persentasi Pelaksanaan Asistensi Pencatapan SKP (100%); 3) Persentase Terhimpunannya SKP 2023 (100%); 4) Persentase Terhimpunnya SKP Awal 2023 (100%); 5) Persentase Fasilitas Absensi Online (100%); 6) Tersedianya aplikasi SIMPEG terintegrasi SAPK BKN.	Sungai Penuh	12 Dokumen	134.653.880	APBD II		12 Dokumen			12 Dokumen	81.759.265
2	5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (1) Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan satya lencana karya satya atas pengabdian PNS (100 Organg); 2) Pelaksanaan Penilaian PNS Teladan (3 PNS)	Sungai Penuh	100 Orang	62.500.000	APBD II		100 Orang			100 Orang	58.500.000
3	5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (1) Jumlah Karis (100 karis); 2) Jumlah Karsu (100 karsu); 3) Jumlah monitoring dan evaluasi disiplin PNS per triwulan (4 Laporan); 4) Jumlah penerbitan surat cuti (300 surat) ; 5) Jumlah penerbitan surat izin keluar daerah (50 surat); 6) Jumlah proses izin perceraian PNS sesuai ketentuan (mediasi untuk merukukan rumah tangga PNS) (10 kasus/mediasi) 7) Jumlah sumpah PNS (30 org)	Sungai Penuh	3100 Orang	56.866.800	APBD II		3100 Orang			3100 Orang	56.080.000

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	4 5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (1) Jumlah laporan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) (4 kali); 2) Jumlah pelaksanaan pemberian sanksi hukuman disiplin PNS (3 hukuman); 3) Jumlah fasilitasi dan pengendalian e-LHKPN secara online terhadap Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan rincian: 1. Walikota; 2. Wakil Walikota; 3. Seluruh JPT Pratama; 4. Seluruh Pejabat Administrator; 5. Seluruh Pejabat Pengawas Lingkup Bakeuda, PUPR, PTSP dan Perizinan; Inspektorat, Bagian ULP, 6. Seluruh pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat; 7.Seluruh pejabat Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa; 8. Seluruh Bendahara Pengeluaran APBD.	5	6 3 Laporan	7 92.434.000	8 APBD II	9 3 Laporan	10 3 Laporan	11 55.977.399
1	5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			471.201.400				203.472.582
1	5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan		1) 5,2 % 2) 89 % 3) 50 % 4) 20,2 JP	471.201.400			1) 5,2 % 2) 89 % 3) 50 % 4) 20,2 JP	203.472.582
1	5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural; Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		75%	71.201.400			75%	9.618.973

No	Kode	Urusan / Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
I	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi [1] Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat teknis 2)Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti uji kompetensi; 3)Jumlah PNS yang difasilitasi mengikuti diklat pembekalan PNS yang memasuki purna tugas]		30 Peserta 15 Orang	71.201.400		30 Peserta 15 Orang	9.618.973
II	5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		60%	400.000.000		60%	193.853.609
1	5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota [Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat dan ujian kenaikan pangkat penyelesaian ijazah;]		60 Orang	50.000.000		60 Orang	9.952.371
2	5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan [1)Jumlah fasilitasi pengiriman peserta diklatpim II (6 peserta diklatpim III (36); 3)Jumlah fasilitasi pengiriman peserta diklatpim IV (34); 4) Jumlah peserta diklat struktural lainnya; 5) Jumlah peserta diklat angka kredit; 6) Jumlah diklat perijinan jabatan fungsional]		6 Laporan	350.000.000		6 Laporan	183.901.238
JUMLAH						9.935.312.564			7.477.979.643

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SKPD



Pada bagian bab ini menguraikan tentang rincian kegiatan yang diusulkan didalam renja SKPD Tahun 2023. Program dan kegiatan yang diusulkan telah berpedoman dan sejalan dengan RPJMD Tahun 2021-2025. Pengusulan kegiatan yang disampaikan telah didukung oleh indikator dan target yang jelas dan terukur yang dapat mempermudah dalam penganggaran. Jumlah anggaran belanja diluar belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar Rp. 3.746.942.980,- dengan perkiraan maju pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.640.385.380,- dan total anggaran belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar Rp. 3.509.387.476,- dengan perkiraan maju pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.512.031.663,- Sehingga total anggaran yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2023 sebesar Rp. 7.256.330.456,- dengan perkiraan maju pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.477.979.643,-. Semua anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel Rencana Kerja (SIPD) dan Rencana Kerja sesuai Permendagri Nomor 050 tahun 2021 yang terdapat pada lampiran dokumen ini.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan anggaran tahun 2023, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran sesuai kebutuhan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh. Adapun kegiatan yang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Nasional	Daerah			
5															
5	03						7,058,888,852					7,424,507,061			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
KEPEGAWAIAN															

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sungai Penuh
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	3,805,353,476						100 %	3,837,594,263	
5 03 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			50 Orang/bulan	3,509,387,476	Kota Sungai Penuh, Sungai Penuh, Sungai Penuh	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	50 Orang/bulan	3,512,031,663	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	65,340,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	12 Dokumen	71,874,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	130,284,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	12 Dokumen	143,312,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	78,342,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	1 Laporan	86,176,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			1 Dokumen	22,000,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	24,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	299,179,096						100 %	308,317,710	
5 03 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			60 Paket	114,022,096	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	60 Paket	117,112,710	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 01	2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			9 Dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	9 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode			Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakdraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20 Orang	145,157,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	20 Orang	151,205,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100 %	280,716,260					100 %	308,787,886	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			17 Paket	11,000,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	17 Paket	12,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			43 Paket	27,500,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	43 Paket	30,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	23,435,500	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	3 Paket	25,779,050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	14,180,760	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	5 Paket	15,598,836	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan			3 Paket	12,100,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	3 Paket	13,310,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	192,500,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	20 Laporan	211,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100 %	304,699,560					100 %	335,169,516	

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Sungai Penuh
Tahun 2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
												Nasional	Daerah					
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			4 unit	304,699,560	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	4 unit	335,169,516	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	%		100 %	242,055,440						100 %	266,260,984	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar			12 Laporan	5,555,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	12 Laporan	6,110,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	187,000,440	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	4 Laporan	205,700,484	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	49,500,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	2 Laporan	54,450,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		100 %	83,600,000						100 %	91,960,000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 unit	71,500,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	4 unit	78,650,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			3 unit	12,100,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN BKPSDM Kota Sungai Penuh	3 unit	13,310,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian jabatan	%		1,744,984,820							94 %	1,948,286,482		
		Persentase ketepenuhan formasi ASN	%									83 %			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	%									100 %			
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan);	%									30 %			
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%									84 %			
		Tingkat pelaporan kinerja ASN	%									100 %			
5 03 02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%	669,961,461	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Kota Sungai Penuh	100 %	964,988,575		
5 03 02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				477,983,061	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Kota Sungai Penuh	2 Dokumen	753,812,335	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				69,000,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Kota Sungai Penuh	1 Dokumen 1 Dokumen	75,900,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				62,905,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	69,195,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaia				60,073,400	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	66,080,740	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	%		%	182,782,430	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				100 %	263,273,288		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				3 Dokumen	32,648,808	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	3 Dokumen	48,139,666	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Laporan kenaikan gaji berkala otomatis				2 Dokumen 1400 Orang	52,183,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	2 Dokumen 1400 Orang	70,183,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Dokumen	97,950,622	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	5 Dokumen	144,950,622	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN berkembang kompetensinya	%		%	71 %	717,065,341						71 %	467,707,955	
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	580,255,732	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	1 Dokumen	172,717,385	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	71,809,609	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	50 Orang	78,990,570	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.03 05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				5 Dokumen	0	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	5 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				150 Orang	65,000,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	ASN Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh	150 Orang	66,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	%		%	100 %	175,175,588						100 %	252,316,664	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				12 Dokumen	60.618,189	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	12 Dokumen	81,759,265	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Pelaksanaan Penilaian PNS Teladan				100 Orang 1 Kali	46,500,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	100 Orang 1 Kali	58,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3100 Orang	38,080,000	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	3100 Orang	56,080,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				3 Laporan	29,977,399	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	3 Laporan	55,977,399	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						197,441,604						203,472,582		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pegawai yang telah memenuhi kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan Persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural; Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	% % % JP			5,2 % 89 % 50 % 20,2 JP	197,441,604					5,2 % 89 % 50 % 20,2 JP	203,472,582		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan Kompetensi Teknis ASN	%			78 %	9,333,864					78 %	9,618,973		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				80 Orang	9.333,864	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	80 Orang	9,618,973	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	%		75 %	188,107,740					75 %	193,853,609		
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				60 Orang	9,657,380	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	60 Orang	9,952,371	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Laporan	178,450,360	Kota Sungai Penuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN	6 Laporan	183,901,238	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
TOTAL						7,256,330,456						7,627,979,643			

BAB V

PENUTUP



Rencana Kerja Tahun 2023 memuat Kerangka Kerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh. Keluaran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) dalam 1-3 tahun kedepan. Dokumen Renja SKPD berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya. Kaidah – kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, yaitu :

1. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 tidak hanya memuat program, kegiatan – kegiatan dan pelayanan publik, tetapi juga memuat strategi pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
2. Unit – unit kerja dan seluruh stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program – program/ Kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dengan sebaik – baiknya;
3. Sebagai pedoman penyusunan program kegiatan, Rencana Kerja ini disusun dengan mengikuti pendekatan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Sungai Penuh yang diwujudkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh yang terdapat dalam RENSTRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh tahun 2021-2026.

Adapun saran/tindak lanjut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kaitan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kota Sungai Penuh Tahun 2023 antara lain :

1. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan SDM, mengingat pentingnya kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Badan Kepegawaian Kota Sungai Penuh. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan Kepegawaian telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan Pemerintah;
2. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan data dukung dan analisis kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan. Data dukung menjadi penilaian utama Pemerintah dalam memberikan bantuan anggaran;

Sungai Penuh,

2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SUNGAI PENUH



NINA PASTIAN, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19760831 200604 2 011